

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, November 2024, Halaman 29-36
Licenced by CC B
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13924379>

Antropologi Politik Islam Sebagai Fondasi Budaya Negara dan Masyarakat di Indonesia

Muh. Suherman K¹, Kurniati²

¹²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail : muhsuhermank72@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi peran syariah dalam membentuk tatanan politik dan budaya di negara-negara Muslim. Syariah, sebagai sistem hukum dan moral berbasis Al-Qur'an dan Hadis, memainkan peran penting tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini menggunakan pendekatan antropologi politik untuk memahami bagaimana syariah diterapkan dan diadaptasi dalam berbagai konteks, baik di tingkat individu maupun negara. Penerapan syariah beragam di berbagai negara Muslim, mulai dari menjadi landasan utama hukum negara hingga terbatas pada aspek hukum privat dan moral. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana syariah berfungsi sebagai fondasi politik dan budaya yang dinamis, dan bagaimana syariah menghadapi tantangan globalisasi, hak asasi manusia, serta modernitas.

Kata Kunci: *Syariah, antropologi politik, hukum Islam, budaya politik, negara Muslim.*

Abstract

This study explores the role of sharia in shaping political and cultural order in Muslim countries. Sharia, as a legal and moral system based on the Qur'an and Hadith, plays a significant role not only in religious aspects, but also in social, economic, and political structures. This study uses a political anthropology approach to understand how sharia is implemented and adapted in various contexts, both at the individual and state levels. The application of sharia varies across Muslim countries, from being the main foundation of state law to being limited to aspects of private law and morality. Thus, this study provides new perspectives on how sharia functions as a dynamic political and cultural foundation, and how it faces the challenges of globalization, human rights, and modernity.

Keywords: *Sharia, political anthropology, Islamic law, political culture, Muslim states.*

Article Info

Received date: 25 September 2024

Revised date: 05 Oktober 2024

Accepted date: 13 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan spiritual, tetapi juga sistem komprehensif yang mencakup aspek sosial, budaya, dan politik. Syariah, sebagai hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama, berperan sentral dalam membentuk tatanan kehidupan umat Muslim, baik individu maupun bernegara. Syariah mengatur lebih dari sekadar ibadah, mencakup pula hubungan sosial, keluarga, ekonomi, dan politik.

Banyak negara mayoritas Muslim memainkan syariah sebagai peran sentral dalam membentuk norma sosial dan struktur politik. Penerapan syariah bervariasi, mulai dari menjadi landasan utama hukum negara seperti di Arab Saudi dan Iran, hingga terbatas pada hukum privat dan moral seperti di Indonesia dan Malaysia. Variasi ini mencerminkan perbedaan interpretasi dan implementasi syariah yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa syariah bukan hanya aturan agama, tetapi juga fondasi politik dan budaya yang mempengaruhi hubungan negara dengan masyarakat.

Antropologi politik Islam menawarkan kerangka analitis untuk memahami bagaimana syariah membentuk tatanan politik di masyarakat Muslim. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya interaksi antara hukum Islam, kekuasaan politik, dan dinamika sosial dalam berbagai konteks. Selain itu, antropologi politik juga menyoroti pengaruh budaya, seperti tradisi lokal, sejarah kolonial, dan perubahan sosial modern terhadap penerapan syariah. Terma ini menunjukkan bahwa syariah diadaptasi dan ditafsirkan dalam era modern dan global.

Syariah adalah pilar identitas banyak negara Muslim. Namun, pada era modern ini, penerapan syariah menghadapi tantangan serius, terutama dalam konteks hak asasi manusia dan demokrasi. Perdebatan seputar syariah seringkali berpusat pada dua pandangan yang bertentangan tersebut. Pendukung syariah melihatnya sebagai sistem yang adil dan komprehensif, sementara kritikus khawatir akan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Perdebatan yang berkaitan dengan demokrasi dan HAM pada konteks syariah?

Dalam konteks globalisasi yang dinamis, penelitian ini mengkaji peran sentral syariah dalam membentuk budaya politik negara-negara Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana syariah beradaptasi dengan perubahan sosial, serta bagaimana syariah dapat menjawab tuntutan modern, seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang hubungan syariah dalam membentuk budaya negara dan Masyarakat. Nur Khasanah, dkk. Dalam kajiannya “Fenomena Fundamentalisme Islam dalam Perspektif Antropologi” meneliti fenomena fundamentalisme Islam dari perspektif antropologi. Selaras dengan penelitian Hamzah, Samiung Katu dalam kajiannya “Pemikiran Islam tentang Hubungan Negara dengan Agama” yang juga menganalisis pemikiran Islam tentang hubungan negara dan agama, namun belum menitikberatkan pada peran syariah dalam membentuk budaya. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh A. Bakir Ihsan Cucu Nurhayati “Agama, Negara dan Masyarakat: Tokoh Agama ditengah Politik Identitas Warga Kota” yang membahas peran tokoh agama dalam politik identitas, tetapi belum secara eksplisit membahas peran agama dalam membentuk budaya negara dan masyarakat. Ketiga penelitian tersebut belum membahas secara mendalam hubungan antara syariah, politik, dan budaya.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi politik untuk mengkaji syariah, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek hukum dan teologis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana syariah berinteraksi dengan konteks sosial dan budaya yang beragam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana syariah membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial di negara-negara Muslim. Dengan mengkaji peran syariah dalam berbagai konteks, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara agama dan negara dalam dunia yang semakin kompleks.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *library research* studi komperatif dengan menggunakan metode pendekatan teologi normative syar’i, antropologi, dan *local wisdom*. Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui data primer berupa buku, jurnal dan sumber literatur lainnya. Kemudian untuk mendukung data-data primer yang diangkat, digunakan data sekunder berupa literatur dan data-data empiris yang mendukung penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis eksploratif untuk menguraikan permasalahan agar melahirkan Solusi yang solutif serta mampu mengidentifikasi pola dan peran syariah dalam membentuk budaya negara dan Masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Antropologi Politik Islam Dalam Budaya Bernegara

Antropologi politik Islam adalah cabang studi yang berusaha memahami interaksi antara agama Islam, budaya masyarakat, dan dinamika politik di berbagai wilayah dengan mayoritas atau minoritas Muslim. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana ajaran-ajaran Islam memengaruhi pembentukan struktur kekuasaan, mekanisme pengambilan keputusan, hubungan antara negara dan warganya, serta bagaimana Islam menyesuaikan diri dengan budaya politik lokal di berbagai konteks.

Keterarikan kaum antropolog terhadap agama mulai muncul pada masa-masa kolonialisasi yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Hal demikian dipicu oleh keberhasilan dalam mereka menemukan “dunia baru,” yakni sebuah dunia yang begitu berbeda dengan dunia mereka di Eropa. Pada masa itu dunia Eropa terkenal begitu sekuler dan tidak (mau) mengenal agama. Sedangkan pada dunia timur, justru mereka menemukan hal yang benar-benar baru bagi mereka, yakni munculnya

berbagai fenomena kebudayaan yang begitu erat kaitannya dengan agama yang tumbuh subur di dalamnya.¹

Bangsa Indonesia yang sangat dipengaruhi karakteristik antropologisnya dengan Hukum Islam sebagai ketentuan Tuhan yang diyakini oleh mayoritas warga negara Indonesia. Hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai falsafahnya. Islam sebagai sebuah keyakinan dan Ideologi yang dianut mayoritas penduduk Indonesia yang mengajarkan kepada kebaikan dan kebenaran telah mewarnai sumber-sumber hukum di Indonesia dalam tataran pelaksanaannya. Di Indonesia, Islam merupakan pelembagaan dari keyakinan yang sejalan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila.²

Para ilmuwan sepakat bahwa fenomena agama merupakan fenomena universal yang pasti dialami oleh setiap manusia di muka. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa setiap manusia yang satu dengan yang lainnya memiliki penafsiran masing-masing tentang agama itu sendiri. Oleh karena itu, dalam hal ini kita harus dapat membedakan keberadaan dua entitas keberagaman itu sendiri, yaitu antara agama yang normatif dan agama yang historis.³

Amin Abdullah menyatakan bahwa agama selalu mencakup dua entitas yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu normativitas (teks, ajaran, belief, dan dogma) dan historisitas (praktik dan pelaksanaan ajaran). Dalam konteks ini, Amin Abdullah menilai bahwa kemunculan perbedaan penafsiran terhadap agama itu sendiri terletak pada dimensi historis dan bukan pada dimensi normatif.⁴

Salah satu definisi politik Islam yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini adalah pengertian yang diajukan oleh Ahmad Fathi Bahansa berpendapat bahwa siyasah syar'iyah (politik syariah; politik Islam) adalah pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan syara'. (Djazuli 2003) Dari pengertian ini memberikan pemahaman bahwa esensi politik dalam Islam sangat penting kedudukannya dalam kaitan pengaturan, regulasi dan perundang-undangan yang dapat mengatur dan mendorong terlaksananya kemaslahatan manusia sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat tertentu dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum Islam, sehingga keberlakuan hukum Islam dalam suatu wilayah komunitas atau masyarakat politik (seperti negara) dapat terwujud.⁵

Pergumulan antara ajaran agama dan realitas kultural sebagaimana tergambar diatas dapat kita lihat dalam berbagai praktik ritual keagamaan pada masyarakat Indonesia. Sebut saja di antaranya adalah perayaan Idul Fitri. Dalam perayaan salah satu hari besar Islam tersebut, masing-masing daerah memiliki cara pelaksanaan yang saling berbeda. Dalam masyarakat Jawa dapat kita temukan adanya tradisi sungkeman (bersilaturahmi kepada yang lebih tua), maka dalam masyarakat Madura terdapat tradisi ter-ater, yakni berbagi menu makanan kepada para kerabat dan tetangga.⁶

Keberadaan konsepsi politik pemerintahan Islam tampak begitu menonjol dalam komposisi strukturalnya. Konsepsi-konsepsi tersebut menghidupkan berbagai kecenderungan luhur manusia dan menempatkannya sesuai dengan keperluan pengabdian kemanusiaan.⁷

dalam salah satu konsepsi tersebut dikatakan bahwa tugas pemerintahan Islam adalah mengakhiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata di tengah-tengah masyarakat yang tidak tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang ditindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan intelektual. pembebasan itu pada gilirannya akan menjadikan seluruh kekuatan dan potensi mereka menjadi karya konstruktif yang terarah pada pembebasan masyarakat secara keseluruhan.⁸

Dalam budaya bernegara, hubungan antara agama dan negara dalam Islam bervariasi tergantung pada sejarah dan konteks sosial-politik di setiap wilayah. Secara historis, model negara Islam ideal adalah kekhalifahan, di mana kepala negara menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

¹ Ahmad Faidi, *Jl Tentara, And Pelajar No*, "Pa 3 2021," No. 2 (2022).

² Tajul Arifin, "Antropologi Hukum Islam," 2016, 28.

³ Faidi, *Tentara, And No*, "Pa 3 2021."

⁴ Faidi, *Tentara, And No*.

⁵ Pengaruh Sosial, Politik Terhadap, And Pembentukan Hukum, "KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan" 14 (2021).

⁶ Faidi, *Tentara, And No*, "Pa 3 2021."

⁷ Muhammad Baqir Ash Shadr, *Sistem Politik Islam*, Cetakan Ke (Jakarta: PENERBIT LENTERA, 2009),

⁸ Shadr.

Selain sebagai agama, Islam juga menjadi sumber identitas politik dan budaya yang kuat di banyak negara. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya dipahami sebagai sistem moral atau spiritual, tetapi juga sebagai simbol nasionalisme atau kebanggaan budaya. Di banyak negara, Islam menjadi alat untuk memperkuat legitimasi politik.

Antropologi politik juga mengeksplorasi bagaimana Islam beradaptasi dengan konteks budaya lokal di berbagai negara. Meskipun Islam memiliki teks-teks normatif, dalam praktiknya, penerapan ajaran Islam sangat bervariasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan politik suatu negara. Di banyak negara, Islam dipadukan dengan tradisi lokal dan praktik adat setempat, menghasilkan varian-varian budaya politik Islam yang unik.

Salah satu tantangan utama dalam penerapan politik Islam di dunia modern adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai tradisional Islam dengan prinsip-prinsip modern seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Beberapa negara Muslim menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara penerapan syariah dan tekanan dari masyarakat internasional serta tuntutan dari warganya sendiri untuk reformasi politik yang lebih inklusif.

Selain itu, dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama, penerapan syariah sering kali menjadi isu kontroversial karena dianggap bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal kesetaraan gender dan kebebasan beragama.

Antropologi politik Islam menawarkan wawasan penting tentang bagaimana ajaran dan nilai-nilai Islam membentuk budaya politik dalam berbagai negara. Islam, dalam konteks politik, bukan hanya agama, tetapi juga kerangka sosial yang mempengaruhi legitimasi kekuasaan, pembentukan hukum, dan pengambilan keputusan politik. Namun, penerapan politik Islam sangat beragam tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan tantangan sosial yang dihadapi oleh negara-negara Muslim.

Problematika Budaya Negara dan Masyarakat di Indonesia

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan kekuatan sekaligus tantangan besar dalam membentuk budaya negara dan masyarakat. Sebagai negara yang secara geografis sangat luas dan memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi berbagai masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sangat kompleks. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, problematika yang muncul tidak hanya terkait dengan perbedaan budaya dan identitas, tetapi juga dengan cara negara mengelola pluralisme, kesetaraan, keadilan, serta dinamika modernisasi yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat pluralisme tertinggi di dunia. Keberagaman ini mencakup lebih dari 300 kelompok etnis, sekitar 700 bahasa daerah, dan berbagai agama serta kepercayaan. Di satu sisi, keberagaman ini menjadi salah satu kebanggaan nasional yang dirangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu." Namun, di sisi lain, keberagaman ini sering kali menjadi sumber ketegangan sosial dan politik.

Secara konseptual kearifan lokal merupakan bagian dari kebudayaan. Haryati Subadio mengatakan kearifan lokal *local genius* secara keseluruhan meliputi, bahkan mungkin dapat dianggap sama dengan cultural identity yang dapat diartikan dengan identitas atau keperibadian budaya suatu bangsa. Sementara itu konsep kearifan lokal *local genius* yang dikemukakan oleh Quaritch Wales adalah "...the sum of cultural characteristic which the vast majority of people have in common as a result of their experiences in early life" (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai hasil pengalaman mereka di masa lampau).⁹

Indonesia sebagai negara bangsa yang multietnis dan multikultural memang sejak awal berdirinya mengandung masalah legitimasi kultural. Kesenjangan, ketidakadilan, kurangnya pemerataan pembangunan, tirani minoritas yang terjadi di berbagai wilayah di tanah air dalam kenyataannya telah memicu terjadinya konflik sosial di berbagai wilayah di Indonesia, cenderung menjadi luka sejarah yang sulit dilupakan. Namun sering dalam kenyataan dapat disaksikan adanya tuntutan berlebihan baik dalam skala mikro maupun skala makro, bahkan tidak jarang menjadi masalah krusial yang dapat mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini

⁹ Brata Ida Bagus, "Kearifan Budayalokal Perikat Identitas Bangsa," *Jurnal Bakti Saraswati*. Diakses Pada Hari Minggu 20 Juli 2019. Pukul 00.00 WIB 05, No. 01 (2016): 9–16, <https://doi.org/10.1007/S11104-008-9614-4>.

kebijakan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal terjebak pada persoalan politik tanpa aplikasi yang nyata.¹⁰

Identitas masa dan ruang mempunyai makna penting dalam permasalahan kebudayaan. Bagi sebuah negara modern seperti Indonesia, bukan hanya berwujud sebuah unit geopolitik semata, namun dalam kenyataannya senantiasa mengandung keragaman kelompok sosial dan sistem budaya yang tercermin pada keanekaragaman kebudayaan suku bangsa.¹¹

Masalah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia adalah salah satu problematika yang terus menerus dihadapi oleh negara. Meski Indonesia telah mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan masih menjadi isu yang mencolok, baik antara kelompok sosial, antar-wilayah, maupun antar-gender.

Keragaman sosio-kultural di dalam suatu bangsa atau negara memiliki intensitas konflik yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang struktur sosialnya bersifat homogen. Heterogenitas suatu bangsa sering kali menimbulkan konflik antar suku, agama, ras dan antar golongan yang sering diistilahkan di Indonesia sebagai konflik suku, agama, ras dan aliran kepercayaan (SARA). Selain itu, gejala deferensiasi sosial (penggolongan sosial) jika tidak ditangani secara bijak akan menimbulkan kerawanan konflik sosial. Akan tetapi, di sisi lain keanekaragaman sosio-kultural suatu bangsa juga bisa menjadi kekayaan khazanah budaya bangsa dalam percaturan internasional, sehingga keanekaragaman sosial budaya juga berdampak pada keuntungan ekonomis jika dikelola dengan baik. Selain keragaman sosiokultural, ketimpangan ekonomi juga memicu di antara para anggota masyarakat.¹²

Menurut Koentjaraningrat¹³ suatu kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat antara lain : (a) Suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok; (b) Suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua warganya; (c) Aktivitas-aktivitas berkumpul dari warganya kelompok secara berulang-ulang; (d) Suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antar warga kelompok; (e) Suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi aktivitas-aktivitas kelompok; (f) Suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu. Salah satu kelompok tersebut adalah kekerabatan (klan). Klan besar (kelompok marga) merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis ialah keturunan warga-warga pria maupun wanita.¹³

Sejak era Reformasi, Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi yang memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan mereka sendiri. Namun, meski otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan memperbaiki kualitas layanan publik, kebijakan ini juga membawa tantangan baru.

Globalisasi membawa tantangan baru bagi masyarakat Indonesia dalam hal menjaga identitas budaya lokal. Pengaruh budaya asing yang masuk melalui media, teknologi, dan ekonomi semakin mempercepat proses perubahan sosial, yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai tradisional. Penegakan hukum di Indonesia masih menjadi salah satu isu paling kritis yang memengaruhi hubungan antara negara dan masyarakat. Banyak warga yang merasa bahwa sistem hukum tidak adil dan lebih menguntungkan kelompok-kelompok elite.

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam hal pemilihan umum dan partisipasi politik. Namun, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal partisipasi publik yang inklusif dan transparansi pemerintahan.

Antropologi Politik Islam Sebagai Fondasi Budaya Negara Dan Masyarakat

Antropologi politik Islam adalah kajian yang mengamati interaksi antara budaya, politik, dan agama dalam konteks masyarakat Muslim. Di Indonesia, dengan keragaman etnis dan agama, peran

¹⁰ Brata Ida Bagus.

¹¹ Brata Ida Bagus.

¹² Suheri Harahap, "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 1, No. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.30829/Jisa.V1i2.5096>.

¹³ Harahap.

antropologi politik Islam menjadi sangat penting dalam membangun fondasi budaya negara dan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan praktik keagamaan, tetapi juga menyentuh aspek identitas, nilai-nilai sosial, dan tata kelola pemerintahan. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana antropologi politik Islam berkontribusi sebagai fondasi budaya dalam konteks negara dan masyarakat Indonesia.

Antropologi politik Islam mengkaji hubungan antara budaya politik dan nilai-nilai Islam dalam masyarakat. Hal ini mencakup bagaimana ajaran Islam mempengaruhi struktur kekuasaan, pengambilan keputusan, serta hubungan sosial dalam konteks politik. Antropologi politik Islam juga mempertimbangkan berbagai tradisi lokal dan bagaimana mereka berinteraksi dengan prinsip-prinsip Islam.

Pemikiran Politik Islam telah berkembang sejak periode klasik, pertengahan, modern hingga kontemporer. Masing-masing pemikir politik Islam dalam tiap periode mempunyai pandangan yang unik sesuai pengalaman mereka berinteraksi dengan pemerintahan pada masanya. Dari para pemikir tersebut, umat Islam mendasarkan teori dan praktik politiknya hingga kini.¹⁴

Al-Farabi dalam menggambarkan pentingnya sebuah pemerintahan, mengilustrasikan fungsi negara sebagai anggota badan yang apabila satu menderita maka yang lain akan merasakannya. Anggota badan juga mempunyai fungsi dan peran yang berbeda-beda, begitu pula kebahagiaan masyarakat tidak akan terwujud tanpa pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan sebagai manifestasi interaksi sosial.¹⁵

Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan warga masyarakat, warga masyarakat berhak memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Kegiatan warga negara biasa ini pada dasarnya dibagi dua, yakni memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuat dan pelaksanaan keputusan politik. Dengan kata lain, partisipasi politik merupakan perilaku politik tetapi perilaku politik, tidak selalu berupa partisipasi politik.¹⁶

Dalam kenyataan, negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi (partisipasi politik) yang merupakan hak warga negara, persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Dengan kata lain, tidak semua warga negara ikut serta dalam proses politik. Beberapa hal yang mempengaruhi tinggi-rendahnya partisipasi politik seseorang ialah kesadaran politik yang menyangkut kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan sikap kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik).¹⁷

Dalam ranah kebudayaan, identifikasi etnis seseorang akan menjadi bias ketika ia masuk ke ruang publik yang plural seperti kota-kota besar. Konflik dan perselisihan yang didasarkan pada identitas kesukuan akan melemah dengan sendirinya ketika pluralitas dimampatkan dalam ruang publik yang sama dan terbatas. Ditambah lagi, tekanan gaya hidup masyarakat urban yang kurang memberikan celah representasi identitas etnis bagi para anggotanya. Saat eksistensi identitas budaya tradisional mulai terpinggirkan dan tereduksi, saat itulah identitas juga masuk ke situasi krisis.¹⁸

Nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan persatuan memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya negara dan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik.

Politik kebudayaan yang dijalankan oleh setiap rezim penguasa di Indonesia berakar pada konsep pembentukan negara-bangsa yang ada di Eropa. Sejak pecahnya Revolusi Perancis, proses pembentukan negara-bangsa yang baru di Eropa adalah proses homogenisasi kultural dan bukan rasial. Menurut T.K. Oommen, sebuah bangsa haruslah menjadi bangsa yang homogen untuk mendapatkan pemerintahan yang efektif. Namun, di sisi lain, ide homogenisasi yang dikemas dalam

¹⁴ Linda Darmila, Julia Ivanna, And Muhammad Iqbal, "Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013," *Perspektif* 8, No. 2 (2019): 59–71, <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V8i2.2606>.

¹⁵ Darmila, Ivanna, And Iqbal.

¹⁶ Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "濟無No Title No Title No Title," *Journal GEEJ* 7, No. 2 (2020).

¹⁷ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu.

¹⁸ Sukarwo. Wirawan, "Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial Pada Produk Desain Kontemporer," *Jurnal Desain* 04, No. 03 (2017): 311–24, <https://core.ac.uk/download/pdf/236196907.pdf>.

wacana nasionalisme seperti di Indonesia bisa menjadi alat pemusnah identitas budaya daerah. Hal ini diperkuat oleh pendapat Furnivall yang dikutip T.K. Oommen yang mengatakan bahwa nasionalisme pada masyarakat yang plural adalah sebuah kekuatan pengacau yang cenderung memecah belah dan bukan mengkonsolidasi tatanan sosial.¹⁹

Dinamika politik Islam di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari organisasi masyarakat sipil hingga partai politik. Hal ini menciptakan interaksi yang kompleks antara nilai-nilai Islam, budaya lokal, dan praktik politik.

Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika sampai masa renaissance, istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dsb. Sejak dulu, sistem pemerintahan semacam ini ditentang oleh filsuf-filsuf besar. Plato menyifatinya sebagai pemerintahan orang-orang bodoh. Aristoteles menamakannya pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai kebusukan dalam pemerintahan utama (madinah fadhilah).²⁰

Salah satu keberatan lain yang cukup kasat mata adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak praktis apabila jumlah masyarakat telah membesar. Oleh karena itu, Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima di dunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam.²¹

Antropologi politik Islam berperan penting sebagai fondasi budaya negara dan masyarakat di Indonesia. Melalui nilai-nilai Islam yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan persatuan, masyarakat dapat memperkuat identitas kolektif dan meningkatkan partisipasi dalam proses politik. Meskipun terdapat tantangan yang harus dihadapi, dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis, antropologi politik Islam dapat menjadi pilar yang kokoh dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa syariah memainkan peran penting dalam membentuk tatanan politik dan budaya di negara-negara Muslim. Dengan pendekatan antropologi politik, syariah tidak hanya mempengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga struktur sosial, ekonomi, dan politik. Penerapannya bervariasi di setiap negara Muslim, tergantung pada faktor sosial, budaya, dan politik lokal. Dalam konteks modern, syariah menghadapi tantangan dari globalisasi, hak asasi manusia, dan modernitas. Meskipun demikian, nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan persatuan tetap menjadi fondasi yang kuat dalam membentuk identitas politik dan budaya, termasuk di Indonesia, yang sangat dipengaruhi oleh keragaman etnis dan agama.

REFERENSI

- arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam," 2016, 28.
- Brata Ida Bagus. "Kearifan Budaya lokal Perikat Identitas Bangsa." *Jurnal Bakti Saraswati*. Diakses Pada Hari Minggu 20 Juli 2019. Pukul 00.00 Wib 05, No. 01 (2016): 9–16. <https://doi.org/10.1007/S11104-008-9614-4>.
- Darmila, Linda, Julia Ivanna, And Muhammad Iqbal. "Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013." *Perspektif* 8, No. 2 (2019): 59–71. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V8i2.2606>.
- Faidi, Ahmad, Jl Tentara, And Pelajar No. "Pa 3 2021," No. 2 (2022).
- Hakiki, Kiki Muhamad. "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, No. 1 (2016): 1–17.
- Harahap, Suheri. "Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (Jisa)* 1, No. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.30829/Jisa.V1i2.5096>.

¹⁹ Wirawan.

²⁰ Kiki Muhamad Hakiki, "Islam Dan Demokrasi: Pandangan Intelektual Muslim Dan," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 1, No. 1 (2016): 1–17.

²¹ Hakiki.

- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “濟無no Title No Title No Title.” *Journal Geej* 7, No. 2 (2020).
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Sistem Politik Islam*. Cetakan Ke. Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Sosial, Pengaruh, Politik Terhadap, And Pembentukan Hukum. “Kurirositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan” 14 (2021).
- Wirawan, Sukarwo. “Krisis Identitas Budaya: Studi Poskolonial Pada Produk Desain Kontemporer.” *Jurnal Desain* 04, no. 03 (2017): 311–24. <https://core.ac.uk/download/pdf/236196907.pdf>.